

ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Author

Neova Derenov¹, Ratih Yanuar Rizky²

Email :

neovaderenov@gmail.com¹, ratihyanuarr29@gmail.com²

Affiliasi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

Corresponding author

Neova Derenov

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

neovaderenov@gmail.com

Received: Sept 09, 2023

Revised: Des 01, 2023

Accepted: Des 16, 2023

Available Online: Des 30, 2023

Abstrak

Sistem pemerintahan di Indonesia senantiasa berbenah waktu ke waktu demi mewujudkan pemerintahan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya mewujudkan Good Governance telah dilakukan pemerintah melalui pengambilan kebijakan-kebijakan. Good governance dengan berbagai alasan dinilai sebagai konsep pemerintahan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku korupsi di Indonesia, dan menganalisis upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan analisis dekriptif kualitatif dengan pendekatan pada kajian kepustakaan. Penulis menganalisis fenomena kondisi korupsi di Indonesia berdasarkan data dokumen yang dipadukan dengan konsep dan kajian para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga melibatkan pemegang jabatan di tingkat daerah. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa korupsi bahkan dapat merasuki penegak hukum, yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sejalan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kontribusi masyarakat dalam pemerintahan tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap pemerintahan itu sendiri. Pengembangan Good Governance. Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance diselenggarakan dengan adanya reformasi birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun SDM. selain itu upaya pemerintah yang lain dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi.

Kata Kunci: Pemerintahan, Korupsi, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Abstract

The government system in Indonesia is always improving from time to time in order to create good governance for all Indonesian people. The government has made efforts to realize Good Governance through policy making. For various reasons, good governance is considered an ideal government concept to be implemented in Indonesia. This research aims to analyze corrupt behavior in Indonesia, and analyze efforts to realize good governance in Indonesia. This research method uses qualitative descriptive analysis with a literature review approach. The author analyzes the phenomenon of corruption conditions in Indonesia based on document data combined with concepts and expert studies. The research results show that corruption in Indonesia is not only limited to the central government level, but also involves office holders at the regional level. Apart from that, what is more

worrying is that corruption can even penetrate law enforcement, which is supposed to be the enforcer of justice. The emphasis on community participation in government is in line with the democratic system implemented in Indonesia. The community's contribution to government will certainly have a good impact on the government itself. Development of Good Governance. The government's efforts to realize good governance are carried out through bureaucratic reform, implementing bureaucratic reform both in terms of institutions, procedures and human resources. Apart from that, another government effort in implementing good governance is information disclosure.

Keywords: Government, Corruption, Good Governance

PENDAHULUAN

Good governance merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, efisien dengan memegang teguh prinsip-prinsip tertentu. Indonesia mulai berusaha untuk mewujudkan good governance saat dimulainya era reformasi. Artinya sudah 23 tahun Bangsa Indonesia berupaya mewujudkan good governance akan tetapi hingga saat ini perkembangan good governance belum bisa dikategorikan baik. Masih banyak masalah yang berkenaan dengan transparansi, akuntabilitas, efesiensi, partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain. Hal ini menjadi bukti belum berhasilnya good governance di Indonesia.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat ideal diterapkan di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan terlihat apabila good governance berhasil diselenggarakan dengan baik. Menurut Fitri Andalus dan Mohamad Ichsana (2019) Good Governance adalah tata kelola yang baik yang dalam upaya mewujudkannya diperlukan sinergi yang seimbang antar pemerintah, civil society, dan private sector. Dwi Payana (2003) berpendapat bahwa definisi dari good governance merupakan hal yang sulit untuk didefinisikan. Hal ini dikarenakan banyaknya makna etis yang terkandung dalam Good Governance. Sesuatu yang “baik” tergantung dari sudut mana kita memandang karena bisa saja baik untuk suatu masyarakat namun bermakna berbeda bagi masyarakat lain.

Sampai saat ini, upaya penyelenggaraan good governance di Indonesia belum menemui titik keberhasilan. Berbagai faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya oknum di pemerintahan yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Maraknya korupsi. Nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat Indonesia memberi dorongan tersendiri dalam penyelenggaraan Good Governance karena seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka mengakibatkan masyarakat menjadi lebih melek terhadap politik dan pemerintahan.

Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dari pemerintahan. Penyuaran aspirasi tentang penyelenggaraan pemerintah juga lebih aktif jika dibandingkan dengan zaman sebelum teknologi berkembang. Masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasinya melalui media sosial yang tentu lebih cepat dalam menyebarkan informasi. Hal ini tentu menuntut pemerintah untuk lebih cepat menerima aspirasi masyarakat serta melakukan perbaikan pada sistem yang menuai kritikan. Pemerintah Indonesia dalam upayanya menyelenggarakan good governance telah menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan itu bertitik tolak pada prinsip-prinsip good governance yang ada.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengubah sistem birokrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan bersih dari korupsi. Reformasi birokrasi meliputi berbagai aspek, seperti penataan kelembagaan, sistem kepegawaian, sistem remunerasi, dan sistem pengawasan. Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Handayani, 2022). Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku korupsi di Indonesia, dan menganalisis upaya mewujudkan good governance di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pada studi kepustakaan. Metode tersebut digunakan karena penulis ingin mendeskripsikan suatu permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada. "Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia" (Sulistyo-Basuki, 2010:110). Pengumpulann data dilakukan dengan studi Pustaka pada data dokumen terkait dan konsep serta kajian para ahli. Studi pustaka yang dilakukan adalah dengan menggunakan jurnal, buku, dan artikel sebagai sumber informasi yang akan dianalisis. Menurut Sugiono (2005) kredibilitas penelitian akan meningkat jika adanya dukungan dari foto, karya tulis akademik yang telah dipublikasi sebelumnya, serta seni. Analisis Data merupakan proses yang sangat penting di dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebutlah didapatkan makna yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh h Miles Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247) , yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret dalam upayanya untuk mewujudkan good governance di dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah utama yang telah diambil adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai

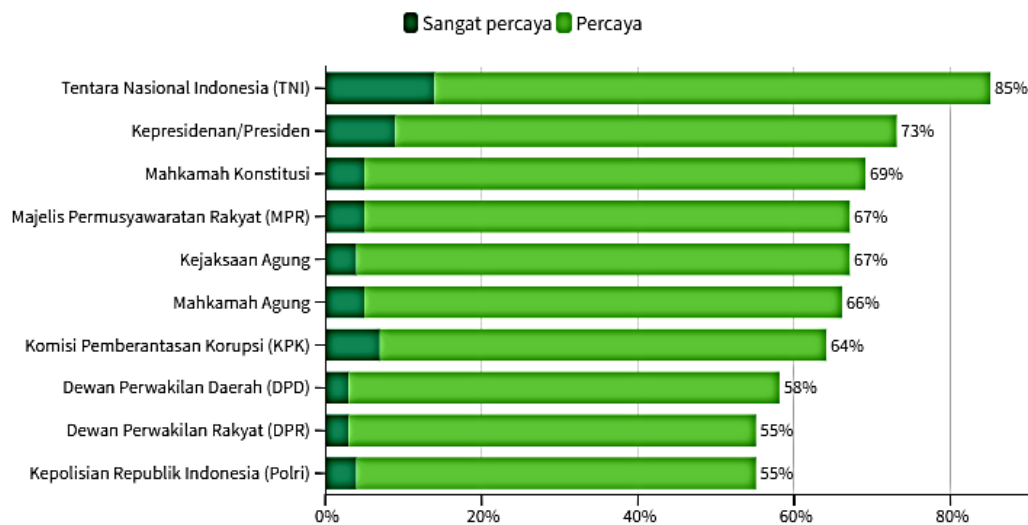
sektor pemerintahan. Dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan praktik korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah berharap untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga telah mendorong implementasi e-government. E-government merupakan salah satu alat yang efektif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat memberikan akses lebih mudah kepada warga untuk berinteraksi dengan berbagai layanan pemerintah, seperti pembayaran pajak, perizinan, dan informasi publik. Ini tidak hanya meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, keterbukaan informasi pemerintahan juga merupakan pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan akses warga negara kepada informasi yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Hal ini menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Kebijakan-kebijakan ini dijalankan dengan dasar prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Dengan cara ini, pemerintah berupaya membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola yang baik, yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Semua ini merupakan langkah-langkah penting dalam upaya mewujudkan good governance di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Charta Politika pada tahun 2022 memberikan gambaran menarik mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan tokoh-tokoh pemerintahan di Indonesia. Salah satu temuan utama adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki peringkat pertama dalam hal kepercayaan dari rakyat Indonesia. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap institusi militer, yang merupakan aset penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Tempo, 2022

Gambar 1
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Publik

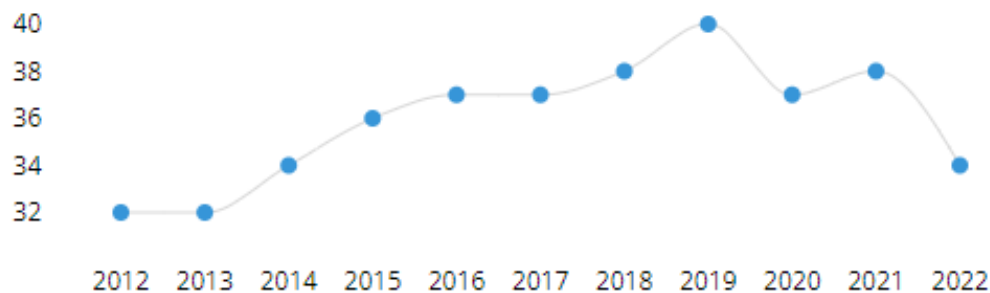
Di sisi lain, Presiden berada di peringkat kedua dalam hal kepercayaan publik. Meskipun pemerintah memiliki posisi penting dalam mengelola negara, peringkat kedua ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang cukup kuat dari masyarakat terhadap kepemimpinan presiden. Ini menandakan bahwa pemerintahan memiliki dukungan publik yang substansial dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Secara keseluruhan, tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga pemerintahan dapat dianggap tinggi, sesuai dengan temuan dari survey Charta Politika. Namun, ada aspek yang perlu dipertimbangkan. Survey ini juga menyuguhkan kesempatan untuk evaluasi pemerintahan. Meskipun lembaga penyelenggara pemerintahan mendapat tingkat kepercayaan yang baik, mereka tidak menduduki peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dianggap sebagai peringatan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik.

Kemudian Indeks Presepsi Korupsi adalah sebuah survey yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yang bernama Transparency International. Survey dilakukan berdasarkan pandangan masyarakat terhadap korupsi yang ada di jabatan politik atau pemerintahan. Perhitungan IPK ini adalah semakin tinggi skor maka tingkat korupsi di suatu negara dianggap rendah dan sebaliknya jika skor rendah maka tingkat korupsi tinggi. Skala yang digunakan adalah 0-100. Indeks Presepsi Korupsi di Indonesia dari tahun 2012-2022 mengalami naik turun akan tetapi dapat diketahui bahwa indeks presepsi Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan skor 37 yang negara ini ke peringkat 110, turun dari tahun 2021 Indonesia mampu berada di peringkat 106 dengan skor 34. Peringkat 110 dari 180 Negara tentu menjadikan

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Survey ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Score changes 2012 - 2022



Sumber: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>

Gambar 2

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari tahun 2012-2022

Data yang tersedia dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia untuk periode 2008-2022 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang situasi korupsi di negara ini. Data ini mencakup berbagai tahap penanganan kasus korupsi, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan inkrah, dan eksekusi. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi masih merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya menciptakan good governance di Indonesia. KKN telah merasuk dalam berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Catatan hitam korupsi di Indonesia telah menjadi rahasia umum, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Praktik korupsi ini merugikan negara dan warganya, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga melibatkan pemegang jabatan di tingkat daerah. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa korupsi bahkan dapat merasuki penegak hukum, yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia sangat meluas dan memerlukan tindakan nyata untuk memberantasnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan sejauh mana korupsi dipandang sebagai masalah dalam suatu negara. Posisi Indonesia di peringkat 110 dalam IPK adalah refleksi dari sejauh mana masyarakat dan pihak luar melihat korupsi sebagai

permasalahan serius di negara ini. Untuk meningkatkan posisi ini, Indonesia perlu melanjutkan upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, dan membangun good governance yang kuat. Hanya dengan tindakan tegas dan konsisten, Indonesia dapat mengatasi permasalahan korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya.

Kepercayaan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan good governance. Dalam konteks good governance, kepercayaan publik memainkan peran kunci karena ia menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dapat membawa dampak positif pada kemajuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat kepercayaan masyarakat menjadi prioritas dalam memastikan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Salah satu prinsip good governance yang relevan dalam konteks ini adalah "partisipasi masyarakat." Masyarakat yang percaya dan berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil survey tentang tingkat kepercayaan publik dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat, memperkuat good governance, dan meningkatkan kemajuan negara secara keseluruhan.

Pada bulan Juli tahun 2020, Indonesia mencapai prestasi yang membanggakan dalam survey yang dilakukan oleh PBB terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan e-government, atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Negara ini berhasil meraih peringkat ke-88 dalam daftar 100 besar, menandakan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengadopsi teknologi dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam kategori High e-Government Development Index (EGDI), yang menunjukkan tingkat kematangan e-government yang tinggi di negara ini.

Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan e-government menjadi semakin penting di era revolusi industri 4.0. Teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, dan ketergantungan pada teknologi semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Dalam era ini, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. E-government menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Kehadiran e-government juga memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi lebih efektif dengan masyarakat. Berbagai layanan publik, mulai dari perizinan hingga informasi terkait kebijakan pemerintah, dapat diakses dengan cepat melalui platform online. Hal ini tidak hanya memudahkan warga negara, tetapi juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. E-Government merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upayanya mewujudkan good governance (Retnowati, dkk, 2008). E-Government

merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi serta mendapat pelayanan publik. Langkah pembuatan E-Government sangat tepat mengingat kemajuan teknologi serta berbagai keuntungan lainnya. E-Government juga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sebagai partisipasi kepada pemerintah. Hal ini tentu juga memudahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan karena saran dan kritik bisa diterima lebih cepat. Selain itu, pelayanan publik juga bisa dilakukan secara lebih cepat karena bisa diakses di mana saja.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance juga diwujudkan dengan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri diartikan sebagai perubahan mendasar berkaitan dengan administrasi pemerintahan serta mencakup prosedur, kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan. Menurut Eko Prasomo dan Teguh Kurniawan (2008) Reformasi birokrasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan good governance. Kedua konsep tersebut berjalan berdampingan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Langkah untuk bisa menjadi negara maju adalah dengan mengadakan reformasi administrasi atau biasa yang disebut dengan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi menuntut suatu negara untuk bisa menjadi negara yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik (good governance).

Reformasi Birokrasi di Indonesia sedang menjalani proses berkembang, berbagai permasalahan masih dihadapi pelaksanaan reformasi birokrasi baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun SDM. Berbagai kasus yang berkenaan dengan birokrasi sudah sering kita jumpai. Dilihat dari sudut pandang sumber daya manusia, permasalahan yang sering terjadi adalah kualitas SDM yang dinilai belum memadai, masih banyak oknum yang belum profesional, dan berbagai permasalahan lain. Lalu pada sisi prosedur, permasalahan yang biasa ditemui adalah prosedur yang berbelit, belit dan tidak efektif. Hal ini tentu menyebabkan ketidakefektifan waktu. Pada bagian organisasi, pembagian fungsi yang belum jelas menjadi permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup permasalahan eksternal maupun internal. Sedangkan tuntutan publik juga semakin besar. Seiring dengan berjalannya waktu yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan pendidikan, masyarakat menjadi lebih kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat menuntut birokrasi yang efektif dan efisien serta beretika. Etika yang paling disorot adalah perilaku pelayanan dan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Tidak bisa dipungkiri bahwa birokrasi Indonesia masih dikatakan jauh dari birokrasi yang bersih. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, tingkat KKN Indonesia sangat tinggi dan hingga saat ini belum terlihat adanya penurunan dari tindakan tidak terpuji tersebut.

Upaya pemerintah yang lain dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini merupakan wujud dari penerepan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Saat ini banyak laporan pertanggung jawaban yang bisa diakses oleh masyarakat melalui internet. Hal ini merupakan hal yang patut diapresiasi karena masyarakat bisa mengetahui tentang pengelolaan keuangan,

program, dan pertanggung jawabannya. Meskipun Indonesia memiliki Badan Pemeriksa Keuangan, akan tetapi masyarakat juga berhak tahu tentang pengelolaan negara. Transparansi dan akuntabilitas berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Artinya semakin transparan dan akuntabel suatu pemerintahan maka tingkat kepercayaan publik semakin meningkat. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin rendah. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting baik untuk pembangunan maupun dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Langkah-langkah tegas harus segera diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat perwujudan good governance di Indonesia. Berbagai upaya dapat ditempuh, diantaranya:

- a) Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Tindakan hukum yang konsekuen merupakan elemen penting dalam menjaga kepatuhan terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku di Masyarakat (Rosana, 2014). Ketika seseorang melanggar hukum, penting untuk memiliki konsekuensi yang jelas dan tegas, terutama jika pelanggaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Hukum yang tegas dan tanpa kompromi menjadi instrumen penting dalam menjaga kedisiplinan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebuah sistem hukum yang tegas dan tidak memandang bulu sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hukum yang tegas memastikan bahwa pelanggar hukum tidak lepas dari tanggung jawabnya dan harus menghadapi akibat dari tindakan mereka. Hal ini, pada gilirannya, memberikan efek jera yang dapat mencegah individu atau kelompok lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Hukum yang konsekuen juga berperan sebagai peringatan dan batasan bagi para pemegang kebijakan pemerintahan lainnya untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang tegas juga merupakan sarana untuk menciptakan peraturan dan norma yang berlaku merata bagi semua lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari aturan hukum. Dengan demikian, hukum yang tegas mempromosikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan prinsip penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Hukum yang tegas dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan juga memberikan dasar yang kuat untuk mencapai good governance. Pemerintah yang menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas merupakan komponen kunci dalam upaya mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan etis.

- b) Pemerataan pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana pelayanan publik adalah langkah kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan

utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat menerima pelayanan publik dengan nyaman, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Pemerataan pembangunan adalah konsep yang menekankan pentingnya meratakan perkembangan di berbagai daerah dan wilayah, termasuk yang terpencil atau terpinggirkan (Islami, 2014, Wardhana, & Haryanto, 2015). Dengan cara ini, semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan pelayanan publik. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik, serta perbaikan prasarana kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Melalui pemerataan pembangunan, pemerintah berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah yang berbeda.

Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik adalah langkah selanjutnya dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini melibatkan upaya meningkatkan fasilitas dan layanan yang ada, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perbaikan sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan prasarana transportasi dapat mengurangi hambatan dalam mobilitas masyarakat, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya dengan lebih mudah.

Tujuan akhir dari pemerataan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang memastikan bahwa layanan publik tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara. Dengan cara ini, masyarakat dapat merasa nyaman, efektif, dan efisien dalam menggunakan layanan pemerintah, yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan negara secara keseluruhan.

- c) Keterbukaan informasi pemerintahan adalah prinsip penting dalam sistem demokrasi dan tata kelola yang baik (Firdaus, 2019). Prinsip ini mengakui bahwa rakyat memiliki hak yang sah untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk rancangan program, penggunaan dana publik, pelaksanaan kebijakan, dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.

Rakyat yang memiliki akses terhadap informasi pemerintahan dapat lebih baik memahami dan mengawasi tindakan pemerintah. Mereka dapat menilai apakah program-program pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan apakah dana publik digunakan dengan efektif. Selain itu, keterbukaan informasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, atau

bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ini membantu menciptakan mekanisme umpan balik yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Keterbukaan informasi juga membantu dalam memerangi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana dan pertanggungjawaban, pemerintah dapat lebih mudah diawasi oleh masyarakat dan lembaga pemeriksa yang independen. Hal ini menciptakan tekanan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam tindakan pemerintah, sehingga mengurangi peluang untuk korupsi.

Namun, keterbukaan informasi perlu sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan nasional. Meskipun keterbukaan informasi adalah nilai yang sangat dihargai, ada situasi di mana informasi mungkin perlu dilindungi untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, keterbukaan informasi pemerintahan harus diatur dengan cermat, dengan mempertimbangkan keseimbangan yang tepat antara transparansi dan kepentingan lain yang relevan. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat berperan dalam memperkuat tata kelola yang baik dan memastikan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab..

- d) Rekrutmen sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintahan adalah sebuah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pegawai yang dipekerjakan memiliki kualifikasi yang sesuai dan memenuhi standar yang diperlukan (Tampongangoy, dkk,2019)). Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah kemampuan dan kepribadian calon pegawai. Kemampuan yang mencakup keterampilan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, sementara kepribadian mencakup sikap, etika, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di pemerintahan.

Kemampuan calon pegawai sangat penting karena mereka harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Seorang pegawai pemerintah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini termasuk pemahaman yang baik tentang hukum, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di sektor pemerintahan yang mereka layani. Sebagai contoh, pegawai pajak harus memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan dan peraturan pajak.

Selain kemampuan teknis, kepribadian pegawai juga merupakan hal yang sangat penting. Mereka harus memiliki etika dan nilai-nilai yang mendukung pelayanan publik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kepribadian yang baik juga mencakup kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan merespons kebutuhan masyarakat dengan sikap yang ramah dan peduli. Seorang pegawai pemerintah yang memiliki kepribadian yang baik juga dapat menjaga integritasnya dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Rekrutmen SDM pemerintahan yang memperhatikan kemampuan dan kepribadian merupakan langkah kunci dalam memastikan bahwa pemerintah dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat dengan baik. Calon

pegawai yang memenuhi standar ini akan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki proses rekrutmen yang ketat dan adil untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkualitas yang menjadi bagian dari pemerintahan.

- e) Pengembangan penggunaan teknologi dalam pemerintahan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya untuk memodernisasi tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi di dalam administrasi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Nurhakim, 2014)). Dalam era informasi dan digitalisasi saat ini, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Penerapan teknologi dalam pemerintahan membawa banyak manfaat, termasuk dalam meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan sistem komputerisasi dan perangkat lunak yang tepat, banyak proses administratif bisa ditingkatkan secara signifikan. Misalnya, pengolahan data dan pengarsipan dapat dipercepat, pengambilan keputusan dapat lebih tepat dan akurat, dan pengelolaan sumber daya dapat dioptimalkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, karena birokrasi yang efisien akan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik, informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran pemerintah dapat menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini membantu dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penggunaan teknologi dalam pemerintahan juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penerapan e-government dan berbagai inovasi teknologi, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memfasilitasi perkembangan usaha kecil dan menengah. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang modern, adaptif, dan mampu berkontribusi pada kemajuan negara secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan konsep pemerintahan ideal yang dicita-citakan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Good Governance mengusung sifat pemerintahan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan

rakyat. Korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga melibatkan pemegang jabatan di tingkat daerah. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa korupsi bahkan dapat merasuki penegak hukum, yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sejalan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kontribusi masyarakat dalam pemerintahan tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap pemerintahan itu sendiri. Pengembangan Good Governance. Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance diselenggarakan dengan adanya reformasi birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun SDM. selain itu upaya pemerintah yang lain dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi.

Berbagai kebijakan telah dilakukan guna mencapai tujuan ini, diantaranya adalah reformasi birokrasi, E-government, dan keterbukaan informasi pemerintahan. Dalam upayanya menjalankan kebijakan tersebut masih terdapat banyak kendala yang sekaligus menjadi pertanda bahwa Good Governance di Indonesia belum berhasil dijalankan. Meskipun begitu, bukan berarti kebijakan-kebijakan pemerintah gagal, secara bertahap pemerintah sedang melakukan perbaikan diberbagai lini dan berbuah baik. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai pemerintahan yang baik (good governance) karena masyarakat mempunyai andil besar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Penaku.

Damanik, Marudur Pandapotan, Purwaningsih, Erisva Hakiki, 2017, E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau), Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 21 No. 2, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/210202/>

Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta

Firdaus, 2019 Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam

Handayani, Fitria Andalus, & Nur, Mohamad Ichsana, (2022). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11., <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631/3772>

Islami, Fitrah Sari, 2014, Analisis Pola Klaster, Formasi Keterkaitan Dan Orientasi Pasar (Sentra Industri Krupuk Mie Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten

Tegal), Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro,
<https://core.ac.uk/download/pdf/19974738.pdf>

Prasodjo, Eko dan Kurniawan, Teguh. (2008) Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 2-9

Nurhakim, M. R. S. (2014). Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Perubahan Budaya Birokrasi Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(3), 403â€“422.
<https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>

Rosana, Ellya, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol 10, No 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/>

Retnowati, Nurcahyani D., and Daru Retnowati., 2008, Peranan E-government dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. Seminar Nasional Informatika 2008, Yogyakarta, Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2008.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta

Tampongangoy, G. C., Pangemanan, S., & Kimbal, A. (2019). Rekrutmen Tenaga Harian Lepas Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Sekretariat Daerah). Jurnal Eksekutif, 3(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27061>

Tempo.co, 2022, Survei Charta Politika: TNI Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat, beranda, data, Kamis, 29 September, diakses dari <https://data.tempo.co/data/1516/survei-charta-politika-tni-lembaga-paling-dipercaya-masyarakat>

transparency.org, 2022, Corruption Perceptions Index, diakses 25 agustus, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>,

Wardhana, Indra Wisnu And Haryanto, Ragil (2015), Kajian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Komersial Pada Koridor Jalan Taman Siswa Kota Semarang, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, <http://eprints.undip.ac.id/62231/>